

## RINGKASAN

Penelitian ini berjudul “Hubungan Sipil-Militer Dan Demokrasi (Perbandingan Indonesia Dan Turki 1998-2016)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan demokrasi Indonesia dan Turki dalam hal kontrol sipil atas militer dan profesionalisme militer terhadap demokrasi. Indonesia dan Turki sama-sama dalam transisi demokrasi dari rezim otoritarianisme maka upaya konsolidasi demokrasi dibangun agar demokrasi berkembang dengan baik dan tidak kembali ke masa otoritarianisme. Upaya konsolidasi juga berupa upaya membangun supremasi sipil yaitu membuat kontrol sipil atas militer karena militer Indonesia dan Turki merupakan jenis militer *pretorian*. Membangun kontrol sipil atas militer yang berjenis pretorian tidaklah mudah karena militer pretorian suka ikut campur dalam politik dan melakukan intervensi politik bahkan menguasai negara.

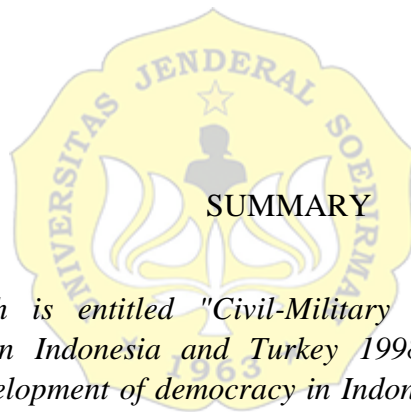
Metode penelitaian ini adalah metode penelitan kualitatif. Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai metodologi penelitian, yaitu mencari data dari dokumen terkait untuk dijadikan informasi penelitian yang berasal dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan, jurnal dan lain sebagainya yang berbentuk teks yang mencakup pembahasan dari dua negara Indonesia dan Turki, terkhusus, mengenai hubungan sipil dan militer. Untuk pembahasan perbandingan politik penelitian ini menggunakan *cross-case study* yaitu membandingkan dua hal yang sama di dua negara yang berbeda.

Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia dan Turki sama-sama masuk gelombang demokratisasi ketiga yang berlangsung dari 1974-kini dengan pola awalnya dipimpin oleh rezim otoriter kemudian beralih ke rezim demokratis lalu berupaya membangun konsolidasi demokrasi. Indonesia dan Turki mempunyai perbedaan dalam jalur transisi demokrasi. Indonesia melalui jalur *replacement* yaitu desakan dari arus bawah atau oposisi untuk membangun demokrasi. Sedangkan Turki melalui jalur *transformative* yaitu elite politik mempolopori dan mendukung sistem demokrasi. Jenis militer Indonesia dan Turki meskipun sama-sama *pretorian* tetapi berbeda tipe. Militer Indonesia mempunyai tipe penguasa *pretorian*, sedangkan militer Turki mempunyai tipe pengawal *pretorian*. Dalam hal intervensi politik jenis militer Indonesia menganggap apabila pemerintahan sipil tidak bisa mengontrol jalannya negara sehingga membuat militer mengambil alih negara dan berkuasa sehingga menciptakan rezim otoritarianisme. Sedangkan jenis militer Turki melakukan intervensi politik terhadap pemerintah sipil apabila pemerintahan sipil dianggap anti sekularisme. Dan militer Turki jika sudah melakukan intervensi politik berupa kudeta militer tidak akan menduduki kursi pemerintahan dalam kurun waktu yang lama hanya sampai pergantian pemerintahan sipil ke

pemerintahan sipil lainnya yang dianggap sesuai dengan ideologi kemalisme dan sekularisme.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perkembangan demokrasi Indonesia dan Turki tidaklah cukup baik karena tidak adanya keselarasan antara sipil dan militer. Kontrol sipil atas militer di kedua negara masihlah lemah. Membangun militer profesional yang berjenis tipe *pretorian* sangatlah sulit karena jenis militer ini selalu ikut campur dalam politik. Jalur transisi Indonesia dan Turki tidak menghasilkan kontrol sipil objektif.

Kata kunci: Demokrasi, kontrol sipil objektif, intervensi politik, militer *pretorian*  
Hubungan sipil-militer.



## SUMMARY

*This research is entitled "Civil-Military Relations and Democracy (Comparison between Indonesia and Turkey 1998-2016)". This research is motivated by the development of democracy in Indonesia and Turkey in terms of civilian control over the military and military professionalism towards democracy. Indonesia and Turkey are both in democratic transition from authoritarian regimes, so efforts to consolidate democracy are built so that democracy develops well and does not return to authoritarianism. Consolidation efforts are also in the form of efforts to build civilian supremacy by establishing civilian control over the military because the Indonesian and Turkish militaries are pretorian types of military. Establishing civilian control over the Pretorian military is not easy because the Pretorian military likes to interfere in politics and intervene in politics and even dominate the country.*

*This research method is a qualitative research method. This research uses literature study as a research methodology, which is looking for data from related documents to be used as research information derived from scientific books, research reports, scientific essays, theses and dissertations, regulations, journals and so on in the form of text that includes discussions from Indonesia and Turkey, in particular, regarding civil and military relations. To discuss the political comparison, this research uses a cross-case study, which is to compare two things that are the same in two different countries.*

*The result of this research is that Indonesia and Turkey both entered the third wave of democratization which took place from 1974-present with the initial pattern being led by an authoritarian regime then switching to a democratic regime and then trying to build democratic consolidation. Indonesia and Turkey have differences in the path of democratic transition. Indonesia is going through the replacement route, namely pressure from the bottom line or the opposition to build democracy. Meanwhile, Turkey is going through a transformative path, where the political elite has pioneered and supported the democratic system. Although the military types of Indonesia and Turkey are both pretorian, they are of different types. The Indonesian military has a Pretorian type of ruler, while the Turkish military has a Pretorian type of guard. In terms of political intervention, the Indonesian military considers that the civilian government cannot control the running of the country, thus making the military take over the country and come to power, thus creating an authoritarian regime. Meanwhile, the Turkish military type intervenes politically against the civilian government if the civilian government is considered anti-secularism. And the Turkish military, if it has intervened politically in the form of a military coup, will not occupy the seat of government for a long time, only until the change of the civilian government to another civilian government which is considered in accordance with the ideology of kemalism and secularism.*

*The conclusion of this study is that the development of democracy in Indonesia and Turkey is not good enough because there is no harmony between civilians and military. Civilian control over the military in both countries remains weak. Building a professional military of the pretorian type is very difficult because this type of military always interferes in politics. Indonesia and Turkey's transitional path did not result in objective civilian control.*

*Keywords: Democracy, objective civilian control, political intervention, pretorian military Civil-military relations.*